

Otonomi Daerah Di Indonesia

Otonomi Daerah pada hakekatnya menciptakan ruang gerak yang lebih bebas bagi daerah otonom untuk membuat kebijakan dan peraturan di tingkat daerah yang melibatkan pihak-pihak terkait yang sesuai dengan pemahaman dan kebutuhan masyarakat masing-masing daerah, dalam rangka peningkatan **Kesejahteraan Hidup**

Masyarakat

Tuntutan dunia yang semakin kontemporer, dan kuatnya pengaruh **globalisasi**, menuntut adanya **Reformasi**

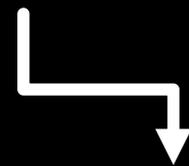
Birokrasi, mengarah pada pemerintahan yang **berdaya saing** (*competitiveness*) dan mempunyai kecepatan, ketepatan dan keakuratan (*effectiveness*) dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan. Dari **pemerintahan birokratis** perlu digiring dan diarahkan kepada **Pemerintahan Wirausaha**



Model Westminster

- ✓ Dikembangkan oleh New Zealand dan Pemerintahan Inggris, kemudian berkembang ke Australia dan Canada.
- ✓ Bersifat inkremental (bertahap), meliputi aspek (1) struktur, (2) strategi, (3) fungsi, (4) proses, (5) sistem dan prosedur dan budaya yang bertujuan memperkuat kapasitas administrasi pemerintah
- ✓ Pendekatan "*New Public Management*" yang bertujuan mengurangi ukuran pemerintah dan mendorong gaya pasar kedalam pemerintahan

Model reformasi birokrasi



Model Amerika

berkembang lebih belakangan mengembangkan strategi dengan **10 *Reinventing Government*** dengan prinsip ***Work Better Cost Less*** dan pengurangan peran pemerintah (*downsizing*).

pemerintahan wirausaha mendorong *kompetisi* antar pemberi jasa. Mereka *memberi wewenang* kepada warga dengan mendorong adanya kontrol dari birokrasi kedalam masyarakat. Mereka mengukur kinerja perwakilannya dengan memusatkan pada *hasil, bukan masukan*. Mereka digerakkan oleh tujuannya – *missi* mereka – bukan oleh ketentuan dan peraturan.

Wirausaha Birokrasi sebagaimana di gagas oleh **Osborne dan Gaebler** diatas, memerlukan reformasi manajerial birokrat dan birokrasinya, yang diimplementasikan dengan menginternalisasi **4 cara berpikir** kepada **jajaran birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Batu**, dan diwujudkan dalam implementasi **kebijakan-kebijakan pemerintah Kota Batu** dalam **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batu tahun 2013-2017**

1) *From top down to partnership/ participatory*

Prinsip ini berarti menekankan partisipasi *stakeholder* dibandingkan perintah dari pemerintah saja.

2) *From bureaucratic style to entrepreneurial mindset*

Cara berpikir ini menekankan pola berpikir kreatif di antara para SKPD dan pro aktif mengembangkan kerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat;

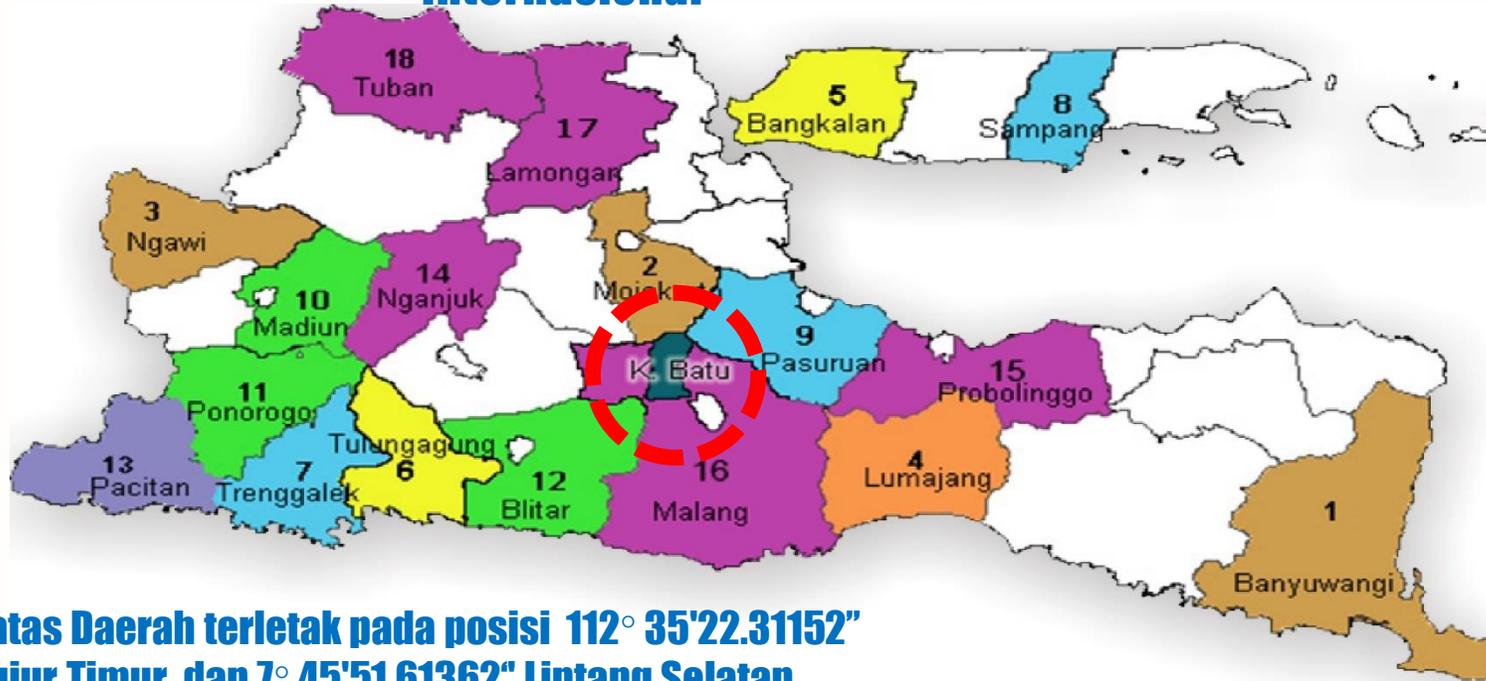
3) *From procedural attitude to end-result oriented*

Perubahan dari cara berpikir yang lambat dan berbelit, kepada pola pikir yang responsif terhadap peluang dan berorientasi pada hasil dan kemanfaatan yang diterima masyarakat;

4) *From partial handling to integrative solution*

Perubahan dari cara berpikir yang sektoral, parsial, kepada pemikiran yang komprehensif, sinergis.

Visi RPJMD 2012-2017 : Sentra Pertanian Organik Berbasis Kepariwisataan Internasional



Batas Daerah terletak pada posisi $112^{\circ} 35'22.31152''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 45'51.61362''$ Lintang Selatan

- ❖ satu-satunya daerah pemekaran di Propinsi Jawa Timur, berdiri 17 Oktober 2001;
- ❖ Daerah agropolitan yang sejuk, dengan sektor Pertanian dan Pariwisata berkembang menjadi potensi Unggulan Daerah;
- ❖ “City Branding = Kota Wisata Batu” yang sangat kuat sebagai destinasi kunjungan WISATA regional maupun Nasional;
- ❖ Dalam rentang 10 tahun terakhir, terjadi peningkatan EKONOMI yang pesat di sektor Pariwisata, UMKM, Konstruksi, Akomodasi Hotel dan Restoran;
- ❖ Investasi Daerah +- 3,2 trilyun;
- ❖ APBD = 906 milyar dengan PAD 106 milyar;

Gambaran Umum Geografis dan Demografis

Luas Wilayah : 199,09 km ²	Penduduk : 214.969 jiwa	A. Kerja : 153.794	IPM : 76,50; IHH : 75,86	PDRB adhb : 11.536 T
Kecamatan : 3	Rumah Tangga : 62.497 KK	Bekerja : 100.970	R Lama Sekolah : 9 Tahun	PDRB adhb perkapita : 57.538 juta
Kelurahan : 5	LPP : 1,74 %	TPT : 4,29 %	A Melek Huruf : 100 %	Rerata LPE 6,9 %
Desa : 19				A Kemiskinan 3,67 %

Program Kebijakan Daerah sebagai pelaksanaan RPJMD 2012-2017

2012 **15,6%**
676,281
MILYAR

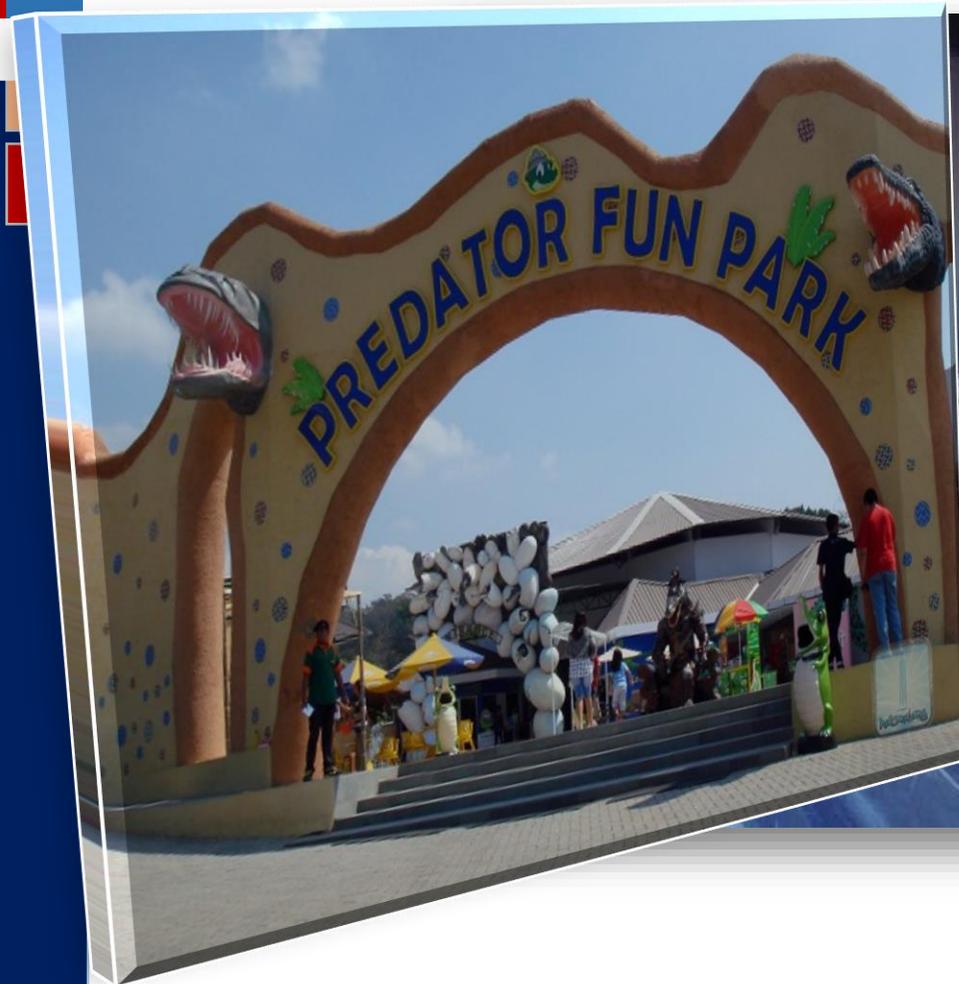
2013 **17,1%**
791,507
MILYAR

2014 **15,6%**
915,072
MILYAR

INVESTASI DAERAH



Derap laju pembangunan di Kota Batu selama ini terutama di sektor pariwisata dan usaha pendukungnya, tidak terlepas dari peran serta piha swasta, pemerintah Kota Batu berusaha mengembangkan iklim yang kondusif untuk iklim investasi, melalui regulasi – regulasi yang mempermudah masuknya penanaman modal, mendorong terjadinya bentuk-bentuk kemitraan antara masyarakat dan sektor privat pemilik modal dalam mengembangkan usaha pariwisata semisal melalui konsesi ataupun kepemilikan saham bersama atas suatu usaha pariwisata



**Kerjasama Mutualisme
Pemerintah Desa – Swasta Nasional**

MODEL KEMITRAAN PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA



**Pembangunan Kereta Gantung
Batu Cabel Car**



MODEL PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA BERBASIS POTENSI LOKAL



Desa Wisata, Petik Bunga, Petik Apel, Atraksi Seni Budaya Lokal



SALINAN



**WALIKOTA BATU
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 20 TAHUN 2015**

TENTANG

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,



PEMERINTAH KOTA BATU
KECAMATAN JUNREJO
KELURAHAN DADAPREJO
Jalan Pronyudo Nomor 29, Kota Batu. Kode Pos 65323
Telepon. (0341) 460817, Fax. -

BERITA ACARA

Nomor : 410.34/ 48 /MUSRENBANGKEL/II/2015

**TENTANG
MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN
KELURAHAN DADAPREJO TAHUN 2015**

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Januari Tahun Dua Ribu Lima Belas, pukul 19.00 WIB, telah diadakan Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan Dadaprejo yang bertempat di Kantor Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu. Musyawarah yang berakhir pukul 22.00 WIB tersebut dihadiri oleh pejabat Kantor Kecamatan Junrejo, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kantor Lingkungan Hidup, Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan KB, Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Kantor Perpustakaan dan Kearsipan, Kepala Kelurahan beserta staf, Ketua dan pengurus LPMK, Ketua dan pengurus Karang Taruna, Ketua RT dan RW se Kelurahan Dadaprejo, Ketua dan pengurus PKK, tokoh masyarakat, dan beberapa unsur serta elemen kelembagaan sosial, ekonomi, seni budaya dan pendidikan, serta keagamaan Kelurahan Dadaprejo yang semuanya berjumlah 75 orang.

Adapun jumlah musyawarah, materi dan pimpinan rapat adalah sebagai berikut :

- A. Topik
Pembahasan prioritas usulan rencana pembangunan Kelurahan Dadaprejo Tahun 2016.
- B. Pimpinan Rapat dan Nara Sumber
Setelah protokol membuka acara, kemudian menyerahkan jalannya musyawarah kepada Kepala Kelurahan Dadaprejo untuk memberikan pengarahannya sekaligus membuka secara resmi MUSRENBANGKEL dan selanjutnya musyawarah dipimpin oleh Ketua LPMK Dadaprejo.
- | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| - Rapat dibuka secara resmi oleh | Lurah Dadaprejo | Parman, SP |
| - Dipandu | Ketua LPMK | H. Suhardjito |
| - Notulen | Kasi Pembangunan | Didik Handri, SH |

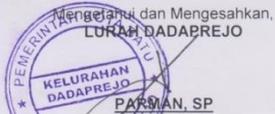
Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas, selanjutnya seluruh peserta Musrenbang Kelurahan Dadaprejo menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berkepentingan menjadi keputusan akhir dari Musrenbang Kelurahan, yang diambil secara Musyawarah Mufakat yaitu :

1. Daftar prioritas usulan rencana pembangunan dan program kerja pembangunan Kelurahan Dadaprejo Tahun 2106 yang akan diusulkan ke Musrenbang Tingkat Kecamatan Junrejo.
2. Daftar tim delegasi Kelurahan Dadaprejo yang akan mengikuti Musrenbang Tingkat Kecamatan Junrejo.

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat menjadi acuan tindak lanjut dan bahan perumusan program kerja pembangunan Tahun 2016 oleh Pemerintah Kota Batu di wilayah Kelurahan Dadaprejo.

Dibuat di : Dadaprejo
Pada Tanggal : 6 Februari 2015
Notulen

DIDIK HANDRI, SH





✓ Pelaksanaan Musrenbang berjenjang yang partisipatif, efektif dan produktif melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan seluruh unsur masyarakat



- ✓ Sinkronisasi dan Integrasi Target Sasaran Output, Outcome, dan Anggaran Program Kegiatan Lintas SKPD Untuk Mencapai Sasaran Prioritas Pembangunan Secara Berjenjang
- ✓ Pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan MEMADUKAN seluruh proses PERENCANAAN dan PENGANGGARAN pendapatan, belanja dan pembiayaan di lingkungan SKPD secara SMART-C untuk menghasilkan DOKUMEN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN.

PERENCANAAN PEMBANGUNAN TEKNOKRATIK TERPADU





VISI

SENTRA PERTANIAN ORGANIK BERBASIS KEPARIWISATAAN INTERNASIONAL

DITUNJANG OLEH **PENDIDIKAN** YANG TEPAT GUNA DAN BERDAYA SAING,
DITOPANG OLEH **SUMBER DAYA ALAM**, MANUSIA, DAN BUDAYA
YANG TANGGUH, DISELENGGARAKAN OLEH
PEMERINTAH YANG BAIK, **KREATIF, INOVATIF**, DIJIWAI OLEH
KEIMANAN & KETAQWAAN DA TUHAN YANG MAHA ESA



INOVASI PROGRAM PEMBANGUNAN PERTANIAN ORGANIK MELALUI GO-ORGANIK





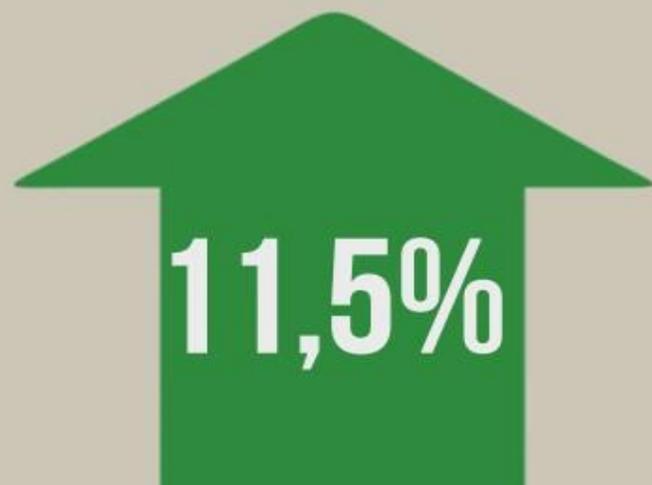






Capaian Hasil – Hasil Pembangunan
TAHUN 2015

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PDRB ADHB



11,536
MILYAR



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PDRB/KAPITA

12,5%
57,538
JUTA



KONTRIBUSI PDRB

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO



16,36%
PERTANIAN



16,16%
JASA AKOMODASI, MAMIN



14,23%
KONSTRUKSI



18.1%
PERDAGANGAN



6.3%
INFORMATIKA



PERTUMBUHAN EKONOMI

2012	7.26
2013	7.28
2014	6.93
2015	6.71
JAWA TIMUR	5.55
NASIONAL	4.72

TERTINGGI SE
JAWA TIMUR
DAN NASIONAL



POTENSI UNGGULAN DAERAH PARIWISATA



20

HOTEL BERBINTANG



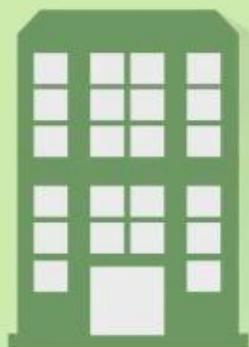
ANGKA KUNJUNGAN
TAHUN 2015

3.961.021



5758

KAMAR



532

HOTEL NON BINTANG



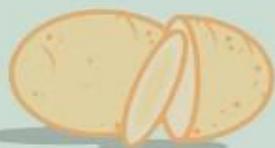
1.274.163

JUMLAH TAMU



10

POTENSI UNGGULAN DAERAH PERTANIAN - TANAMAN HORTIKULTURA



86.371 KW
KENTANG



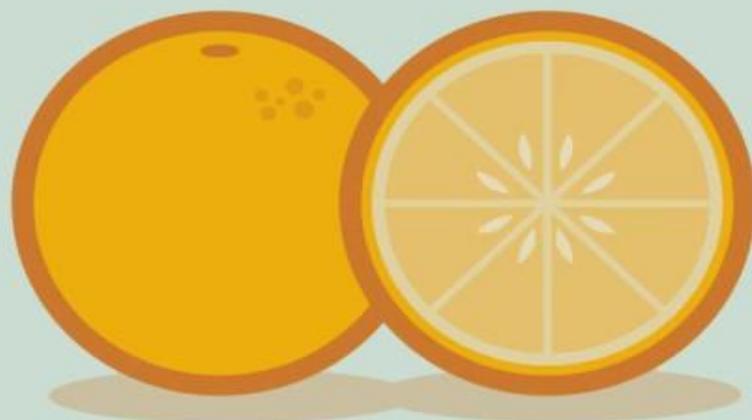
65.519 KW
WORTEL



82.117 KW
KUBIS



86.371 KW
Bawang Daun



132.231 KW
BUAH JERUK



671.207 KW
BUAH APEL



95.698 JUTA/
POTONG
BUNGA MAWAR



32.978 JUTA/
POTONG
BUNGA KRISAN



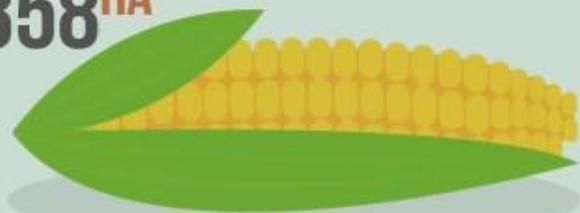
526.871 JUTA/
POTONG
BUNGA ANTHURIUM



1.426 JUTA/
POTONG
BUNGA ANGGREK

POTENSI UNGGULAN DAERAH PERTANIAN - TANAMAN PANGAN

358^{HA}



7.714^{TON}
J A G U N G

734^{HA}

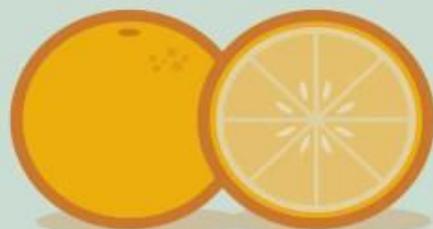


4.862^{TON}
P A D I

51^{HA}



869^{TON}
U B I K A Y U



132.231^{KW}
B U A H J E R U K



671.207^{KW}
B U A H A P E L

Matur Suwun